

PEMKOT PALANGKA RAYA ATASI STUNTING MELALUI PROGRAM 'PAKETING'



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya mengatasi stunting melalui program penanganan pengangguran, kemiskinan dan stunting atau Paketing.

"Saya berharap, semua program prioritas tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini," kata Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Selasa.

Dia menerangkan, program Paketing menjadi fokus utama untuk memastikan masyarakat Kota Palangka Raya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama dalam hal mengurangi angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan ekstrem, dan mencegah stunting pada anak-anak.

Langkah nyata itu melalui intervensi seperti pemberian asupan gizi yang tepat, edukasi kesehatan, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan telah menjadi fokus utama dalam upaya ini.

Untuk itu, lanjut Hera, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan tersebut. Ia berharap bahwa upaya yang dilakukan akan membuahkan hasil yang positif dan memberikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat.

"Tugas kita adalah memastikan bahwa semua upaya ini dapat memberikan hasil yang nyata dan meningkatkan kualitas hidup warga. Kolaborasi dan dukungan dari semua pihak sangat penting untuk mewujudkan harapan ini," katanya.

Dia mengatakan bahwa prevalensi stunting di Kota Palangka Raya telah mengalami penurunan yang signifikan, dari sekitar 28 persen menjadi 14 persen.

"Alhamdulillah, prevalensi stunting di Kota Palangka Raya telah menunjukkan penurunan yang signifikan. Prevalensi yang tadinya berada di angka kurang lebih 28 persen, sekarang telah menurun menjadi 14 persen," kata Hera.

Menurut Hera, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam program penanganan stunting. Pemerintah Kota Palangka Raya bekerja

sama dengan sektor kesehatan, pendidikan, serta dukungan dari masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting.

“Ini semua berkat kerja sama dan kolaborasi banyak pihak yang kita usung bersama. Kami akan terus berupaya keras untuk menekan angka stunting hingga di bawah target, demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita,” tambahnya.

Hera berharap agar penurunan ini menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus meningkatkan upaya dalam menangani stunting.

Disebutkannya, Pemko Palangka Raya akan terus berkomitmen untuk melanjutkan program-program tersebut guna memastikan anak-anak tumbuh dengan sehat dan kuat bebas dari stunting.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus berjuang agar stunting bisa ditekan lebih rendah lagi,” demikian Hera..

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/715331/pemkot-palangka-raya-atasi-stunting-melalui-program-paketing> Selasa, 3 September 2024
2. <https://kaltengpos.jawapos.com/daerah/palangkaraya/09/09/2024/pj-wali-kota-palangka-raya-mengawal-kawal-penuntasan-program-paketing/> Rabu, 4 September 2024

Catatan:

Pemerintah Daerah melakukan upaya penurunan kasus stunting yang terjadi pada daerahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* pada:

1. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; dan

- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.